

KAJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN CAKUPAN PROGRAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2012

Areh Sulistiyo¹, Achmad farich², Samino²

ABSTRAK

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan suatu program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya melalui Program Promosi Kesehatan dan Program Preventif. Salah satu dari program yang terdapat dalam promosi kesehatan adalah program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Tujuan penelitian untuk mengetahui dukungan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pencapaian cakupan program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Kabupaten Pesawaran Tahun 2012.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif* untuk mengetahui gambaran dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pencapaian cakupan program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tatanan rumah tangga di Kabupaten Pesawaran Tahun 2012. Penelitian dilakukan dengan menggunakan bantuan *informan*.

Dari wawancara mendalam yang penulis lakukan terhadap Informan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran didapatkan hasil bahwa kebijakan pemerintah daerah sangat mendukung peningkatan angka cakupan program PHBS. Beberapa faktor penting dalam kebijakan pemerintah daerah antara lain adanya penambahan tenaga kesehatan, adanya penambahan anggaran kegiatan dan sarana prasarana. Tenaga kesehatan yang ada masih di standard yang dipersyaratkan baik segi kuantitas maupun kualitas. Untuk anggaran kegiatan bidang kesehatan terjadi penurunan anggaran dikarenakan pada tahun 2011 dikarenakan adanya keterlambatan penetapan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Pesawaran sehingga menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai acuan kegiatan. Sarana prasarana kesehatan sudah cukup tersedia, namun perlu ditingkatkan kembali khususnya sarana kesehatan rujukan atau rumah sakit umum daerah sehingga pelayanan kesehatan yang dilakukan akan lebih lengkap.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah masih kurangnya tenaga promosi kesehatan yang menjalankan program PHBS, belum adanya anggaran khusus program PHBS, masih minimnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan program PHBS. Saran penulis perlu adanya peningkatan kualitas maupun kuantitas tenaga kesehatan khususnya tenaga promosi kesehatan sehingga program PHBS dapat berjalan, memberikan alokasi anggaran yang jelas pada kegiatan program PHBS dan menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan program PHBS. Yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan angka cakupan program PHBS.

Kata kunci : Kebijakan, Cakupan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

PENDAHULUAN

Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah yang tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor keadilan. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai "kebutuhan publik".

Salah satu contoh kebutuhan publik yang mendasar adalah kesehatan.

Kesehatan adalah pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Salah satu wujud nyata penyediaan layanan publik di bidang kesehatan adalah adanya Puskesmas sebagai perpanjangan tangan dalam pelaksanaan program Dinas Kesehatan.

1. DPRD Kabupaten Pesawaran Lampung

2. FKM Universitas Malahayati Bandar Lampung

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran, memiliki peran dan fungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah khususnya dibidang kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. Sehingga dalam pencapaian tujuan tersebut diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran melaksanakan kebijakan kesehatan yang komprehensif, mencakup program *promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi*

Promosi kesehatan merupakan upaya efektif dalam mengurangi beban penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Salah satu indikator pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk itu dalam rangka mencapai IPM, PHBS tatanan rumah tangga merupakan salah satu kinerja yang mempunyai kontribusi terhadap pembangunan daerah. Untuk memudahkan pencapaian PHBS rumah tangga, maka kegiatan promosi kesehatan masuk di dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Dari survey awal yang penulis lakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran didapatkan data sekunder tentang cakupan pencapaian program promosi Kesehatan dan program preventif pada tahun 2010 terhadap target pencapaian sebagai berikut : Cakupan rumah tangga ber-perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Pesawaran selama tahun 2008-2010 menunjukkan kecenderungan meningkat. cakupan rumah tangga ber-perilaku hidup bersih dan sehat sebesar 24.8% dan terus menunjukkan meningkat sebesar 31.1% pada tahun 2009 dan sebesar 36.6% di tahun 2010. Namun demikian, cakupan rumah tangga ber-perilaku hidup bersih dan sehat tersebut masih dibawah target SPM yang ditetapkan (65%).

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif kualitatif untuk mengetahui gambaran dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pencapaian cakupan program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tatanan rumah tangga di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2012. Bila dilihat dari segi manfaat dan kegunaan maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat evaluatif (*evaluation research*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan yang sedang berjalan dalam rangka mencari umpan balik yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan suatu program atau system.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian tentang Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pencapaian Cakupan Program Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) di Dinas Kesehatan dilaksanakan pada tanggal 05 November 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, petugas pemegang program PHBS Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran yang membidangi tentang kesehatan. Dari wawancara mendalam yang dilakukan penulis, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Man (Tenaga Kesehatan)

Diantara tiga sumber daya kesehatan, tenaga kesehatan merupakan faktor utama dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu kesehatan yang memiliki kemampuan profesional dengan pemahaman paradigma sehat dengan mengutamakan upaya peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.

Kepala dinas kesehatan Kabupaten Pesawaran menyatakan bahwa

"karena masih sedikitnya SDM promosi kesehatan maka melibatkan bidan, perawat, gizi dan sanitaria guna tercapainya program PHBS dan mengusulkan tenaga kesehatan promosi kesehatan ke kementerian kesehatan Republik Indonesia"

Dinas kesehatan Kabupaten Pesawaran sampai dengan tahun 2011 memiliki jumlah tenaga kesehatan sebanyak 245 tenaga kesehatan, yang terdiri dari dokter umum (27 orang), dokter gigi (3 orang), sarjana kesehatan masyarakat (10 orang), sanitarian (4 orang), apoteker (12 orang), gizi (12 orang), bidan (104 orang), perawat (83 orang), dan teknisi medis (10 orang) yang tersebar diberbagai sarana kesehatan milik pemerintah. (Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinkes Kab. Pesawaran). Hal yang sama dikemukakan oleh pemegang program PHBS dinas Kabupaten Pesawaran *"minimal lulusan D III promosi kesehatan yang ada disetiap puskesmas, namun belum terpenuhi yang akhirnya memberdayakan bidan dan perawat yang ada dipuskesmas. Beliau menyatakan sedikitnya SDM yang ada."*

2. Method (Metode)

Yang dimaksud metode dalam penelitian ini adalah kebijakan – kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan dengan kesehatan, baik berupa peraturan pemerintah daerah (PERDA) maupun peraturan – peraturan yang lain.

3. Money (Anggaran)

Pembiayaan program pembangunan kesehatan pada tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011 berasal dari berbagai sumber antara lain : APBN, APBD, pinjaman dan hibah luar negeri

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pesawaran menyatakan *"bahwa terjadinya penurunan anggaran di dinas kesehatan Kabupaten Pesawaran dikarenakan berhentinya pembahasan rencana anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) yang berakhir dengan peraturan bupati (Perbup). Dengan demikian*

terjadi pengurangan anggaran dari tahun yang lalu, kami di DPRD Kabupaten Pesawaran berusaha memberikan anggaran sesuai dengan porsinya"

Kepala dinas kesehatan Kabupaten Pesawaran menyatakan *"untuk anggaran yang ada sudah dapat menjalankan program namun kesadaran masyarakat yang belum terbangun dalam mendukung program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tatanan rumah tangga"*

Sedangkan pemegang program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dinas Kabupaten Pesawaran menyatakan *"anggaran belum optimal pada bidang promotif dan preventif, ini menjadi persoalan yang utama dalam menjalankan program. Anggaran masih minim 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena masih banyak terserap program kuratif dan rehabilitative. Terdapat dana BOK dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) namun tidak digunakan secara optimal pada program promotif dan preventif"*

4. Sarana dan Prasarana

Kepala dinas kesehatan Kabupaten Pesawaran menyatakan *"masih sedikit dan kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) contohnya : alat peraga (tool kits), LCD dan lain lain"*

Pemegang program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dinas kesehatan Kabupaten Pesawaran menyatakan *"masih kurangnya alat-alat yang mendukung dalam menjalankan program promotif dan preventif contohnya : LCD, tool kits, sound system dan lain-lain"*

Dalam pelaksanaan program kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran guna tercapainya maksud dan tujuan pembangunan kesehatan khususnya di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, sudah semestinya didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Beberapa sarana yang telah tersedia di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran antara lain rumah sakit

umum daerah, puskesmas, klinik bersalin, bidan praktek swasta serta beberapa sarana kesehatan milik swasta atau masyarakat. Khusus untuk rumah sakit umum daerah sarana berupa gedung atau unit – unit pelayanan masih sangat kurang sehingga dibutuhkan adanya anggaran khusus dalam penambahan gedung pelayanan baik yang berasal dari APBD maupun APBN.

5. Perencanaan (*Plan of Action*)

Sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan atau program kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, masing masing program atau bidang telah menyusun perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan biasanya dimulai dari perencanaan tingkat puskesmas (PTP) yang selanjutnya dihipunkan dalam perencanaan tingkat dinas kesehatan. Dalam penyusunan perencanaan sudah tentu melihat hasil atau angka cakupan pelaksanaan program pada tahun sebelumnya. Pencapaian angka cakupan program pada tahun sebelumnya menjadi acuan atau dasar dalam penetapan target kegiatan program pada tahun berikutnya sehingga kesenjangan dalam pemberian pelayanan kesehatan dapat terlihat dan terdeteksi yang pada tahun berikutnya dapat direncanakan kembali kegiatan atau program yang belum mencapai target pada tahun sebelumnya.

6. Standar Pelayanan Minimal / SPM

Setiap perencanaan program pelayanan kesehatan tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran yang disusun sudah semestinya memiliki tujuan dan target yang diharapkan akan dicapai pada tahun berikutnya. Dalam menentukan suatu program kegiatan pelayanan kesehatan tersebut telah mencapai target dan tujuan yang diharapkan maka dibutuhkan suatu acuan atau standard pencapaian pelayanan atau yang sering disebut dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM).

7. Angka Cakupan Program

Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran yang terdiri

dari 12 kecamatan dengan 12 puskesmas induk memiliki strategi pelayanan kesehatan yang berbeda satu kecamatan dengan kecamatan yang lain, hal ini dikarenakan setiap kecamatan memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda sehingga akan mempengaruhi dalam pencapaian angka cakupan program pelayanan kesehatan yang ada di kecamatan tersebut. Dari tahun ke tahun angka cakupa program di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran terlihat cenderung meningkat, namun peningkatan angka cakupan program tersebut masih jauh dibawah target yang ditetapkan dalam standard pelayanan minimal (SPM) pada tahun berjalan.

PEMBAHASAN

1. Man (Tenaga Kesehatan)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan baik melalui wawancara mendalam maupun melalui data skunder berupa dokumen – dokumen pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, sumber daya manusia atau tenaga kesehatan yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran masih sangat kurang. Rasio tenaga kesehatan yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran per 100.000 penduduk antara lain :

- a. Untuk tenaga bidan sebesar 47,7 per 100.000 penduduk sedangkan target nasional pada tahun 2010 sebesar 100 per 100.000 penduduk. Dari kondisi tersebut terlihat jelas bahwa tenaga bidan masih sangat kurang di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
- b. Untuk tenaga perawat sebesar 19,5 per 100.000 penduduk sedangkan target nasional tahun 2010 sebesar 117,5 per 100.000 penduduk. Dari data tersebut jumlah tenaga perawat yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran masih sangat jauh dari target nasional dan masih membutuhkan jumlah perawat yang sangat banyak dalam mencapai tujuan dan target nasional.

- c. Untuk tenaga dokter umum rasio yang ada sebesar 6,8 per 100.000 penduduk, sedangkan target nasional tahun 2010 sebesar 40 per 100.000 penduduk
- d. Untuk rasio tenaga dokter gigi yang ada sebesar 1,7 per 100.000 penduduk sedangkan target nasional tahun 2010 sebesar 11 per 100.000 penduduk
- e. Untuk rasio tenaga dokter spesialis tidak terdapat atau tidak ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran sedangkan target nasional tahun 2010 sebesar 6 per 100.000 penduduk

Dari data tersebut diatas terlihat jelas rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran masih sangat kurang dari target nasional. Selain masalah rasio atau jumlah tenaga kesehatan yang masih jauh dari ideal, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran juga memiliki permasalahan yang lebih mendasar yaitu dari jumlah tenaga kesehatan yang ada masih banyak yang belum memiliki profesionalisme yang sesuai standard pelayanan kesehatan, belum lagi dari segi tingkat pendidikan, maka masih banyak tenaga kesehatan yang berpendidikan dibawah strata satu (S-1) sehingga dalam pemberian pelayanan kesehatan masih belum sesuai standard profesi kesehatan.

Untuk mencapai target pelayanan PHBS di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran seperti yang tertuang dalam standard pelayanan minimal (SPM) pada tahun 2012 ini sebesar 75 % maka masih banyak dibutuhkan sumber daya manusia atau tenaga kesehatan khususnya tenaga kesehatan yang berbasis pendidikan S-1 Kesehatan masyarakat dan tenaga D-3 atau D-IV kesehatan lingkungan, sehingga diharapkan target standard pelayanan minimal khususnya pelayanan PHBS akan tercapai.

2. Method (Kebijakan)

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Abdul Wahab, 1997 : 3)

Syarat-syarat pelaksanaan kebijakan menurut Irfan Islami (1998) ada 4 (empat) macam yaitu :

- a. Isi kebijakan
- b. Informasi kebijakan
- c. Dukungan kebijakan
- d. Pembagian potensi kebijakan

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran didapatkan informasi terkait dengan kebijakan – kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran yang berisikan tentang kebijakan kesehatan. Adapun beberapa kebijakan tersebut antara lain :

1. Mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kabupaten pesawaran yaitu :

- 1.1. Mendirikan rumah sakit umum daerah
- 1.2. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dibidang kesehatan
- 1.3. Memberikan pelayanan kesehatan keliling secara gratis (menempatkan tenaga kontrak paramedis 4 orang disetiap kecamatan)
- 1.4. Memberikan Jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA)

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran tentang kesehatan sangat mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesawaran sehingga dalam implementasi kebijakan yang ada sangat dibutuhkan faktor pendukung sumber daya manusia atau tenaga kesehatan yang mampu menginterpretasikan isi kebijakan tersebut. Di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran sangat sedikit sekali jumlah tenaga kesehatan yang mampu memahami arah dan isi kebijakan kesehatan, sehingga pencapaian tujuan pembangunan kesehatan khususnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS) akan sulit tercapai. Selain kebijakan – kebijakan pemerintah

daerah, juga dibutuhkan strategi khusus dalam pelaksanaan atau pengimplementasian kebijakan tersebut. Strategi – strategi tersebut biasanya tertuang dalam rencana pembangunan kesehatan Kabupaten Pesawaran baik rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.

3. *Money* (Anggaran)

Dari hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting terlaksananya suatu program kegiatan. Sumber anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Hibah atau bantuan luar negeri dari segi jumlah sudah sangat cukup dalam mendukung terlaksananya setiap program kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran. Dari besaran jumlah anggaran tahun 2010 dan tahun 2011 masih terjadi kesenjangan terutama dalam pemerataan anggaran dalam setiap program kegiatan, yang pada akhirnya tujuan pembangunan kesehatan program PHBS sangat sulit akan tercapai.

4. Sarana dan Prasarana

Guna mendekatkan sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran telah menyediakan sarana kesehatan berupa puskesmas induk sebanyak 12 puskesmas, dan puskesmas pembantu sebanyak 36 puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran. Pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran juga melengkapi sarana pelayanan kesehatan tersebut dengan prasarana baik berupa alat kesehatan yang memadai juga dilakukan penambahan ketrampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan dasar melalui beberapa pelatihan – pelatihan atau diklat kesehatan.

Untuk mencapai target standard pelayanan minimal dari setiap program kegiatan, penyediaan sarana pelayanan kesehatan, peralatan kesehatan dan

tenaga kesehatan yang profesional dipandang masih belum mampu mendongkrak pencapaian target standard pelayanan program PHBS di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran. Masyarakat lebih membutuhkan stimulus – stimulus pembangunan sarana PHBS pada tatanan rumah tangga yang meliputi :

- a. Jaminan Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
- b. Memberi pendidikan pentingnya ASI eksklusif
- c. Seruan dan edaran pergi ke posyandu untuk menimbang balita setiap bulan
- d. Sarana penyediaan air bersih
- e. Sarana atau tempat mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
- f. Penyediaan sarana jamban sehat
- g. Gerakan pemberantasan jentik di rumah sekali seminggu
- h. Gerakan makan buah dan sayur setiap hari
- i. Menyediakan sarana olahraga dan rekreasi keluarga
- j. Peraturan untuk tidak merokok di dalam rumah

5. Perencanaan (*Plan of Action*)

Dari hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan kepada sub bagian perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, diketahui bahwa penyusunan perencanaan kegiatan atau yang sering dikenal dengan *Plan Of Action* (POA) merupakan suatu keharusan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Perencanaan yang disusun mengikuti cara *Down to Top*, dimulai dari tingkat pelayanan paling depan yaitu puskesmas dengan perencanaan tingkat puskesmas (PTP).

Perencanaan memberikan arah yang jelas pada pelaksana program kegiatan, sehingga tujuan dan target kegiatan akan mudah di capai. Selain itu dalam penyusunan perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran tetap berdasarkan pada pencapaian target atau angka pencapaian program pada tahun sebelumnya, sehingga pada tahun yang akan berjalan dapat diberikan solusi atau pemecahan masalah pada tahun sebelumnya.

6. Standar Pelayanan Minimal

Setiap program kegiatan kesehatan yang telah di buat perencanaan sebelumnya, untuk mengukur atau mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan suatu standard atau acuan pencapaian target suatu kegiatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran telah memiliki standard pelayanan minimal untuk setiap program kegiatan yang akan dilakukan. Salah satunya adalah standard pelayanan minimal program kegiatan PHBS. Pada tahun 2012 angka cakupan standard pelayanan minimal program PHBS sebesar 75%, namun angka pencapaian cakupan program PHBS pada tahun 2012 hanya sebesar 42,55% masih jauh dibawah standard yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap pencapaian cakupan program PHBS di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran dapat disimpulkan sebagai berikut : Tenaga kesehatan yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran dari segi kuantitas atau jumlah dan kualitas masih sangat kurang, sehingga belum dapat meng-cover pemberian pelayanan kesehatan khususnya program PHBS, kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran tentang kesehatan telah mendukung pelaksanaan program kesehatan khususnya program PHBS, anggaran kegiatan dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran telah memiliki sumber anggaran yang jelas dan cukup, sarana prasarana telah disediakan oleh pemerintah daerah berupa 12 puskesmas induk dan 36 puskesmas pembantu, perencanaan yang ada di dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran telah tersusun secara down to top

sehingga akar permasalahan dapat diketahui.

SARAN

Perlu adanya penambahan tenaga kesehatan yang memiliki profesionalisme dan tetap berpijak pada etika profesi, adanya pemerataan alokasi anggaran khususnya anggaran untuk program kegiatan PHBS, adanya penambahan sarana pelayanan di rumah sakit umum daerah dan sarana yang mendukung program PHBS, untuk penetapan standard pelayanan minimal setiap tahunnya sebaiknya dikaji kembali berapa besaran SPM yang akan ditetapkan sebagai acuan pelayanan khususnya program PHBS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abikusno, 2001 ; *Materi Ajar Biostatistik*, Bandar Lampung
- Tjiptoherijanto, prijono, Said Z. Abidin, *Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional*. 1993. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta
- Alimul, A. 2002 ; *Riset Keperawatan dan Teknis Penulisan Ilmiah*. Salemba. Medika Jakarta.
- Arikunto, 2002; *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dr. Santoso Soeroso. 2003 ; *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Rumah Sakit, Suatu Pendekatan Sistem*. Cetakan I. EGC. Jakarta
- Notoatmodjo, 2005 ; *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Cetakan Ketiga, PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Notoatmodjo, 2010 ; *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasinya*. Cetakan Kedua, PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dra. Zuraida Thoha,SKM, MPh, Ir. Dina Agoes,M.Kes, 2006 ; *Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Rumah Tangga*, Dep. Kes R I